
Upaya Pemerintah Filipina Pada Masa Rodrigue Duterte Dalam Menangani Konflik Minoritas Bangsamoro Tahun 2016-2018

Author: Diar Abdi Hindiarto

Author Affiliation: Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

e-mail address: ramzhyde@gmail.com

Submitted: (leave in blank), Accepted: (leave in blank)

Abstract

The Peace of Agreement Conducted by the Philippine government againts the minority conflict in Bangsamoro often found a deadlock and a mismatch goals between two parties. Therefore, the administration of Duterte promised to bring peace to the Bangsamoro Muslim minority. Duterte continued various more democratic negotiation and mediation efforts from the peace efforts that had been made by the previous Government with MNLF and MILF. The policy of granting special autonomous regions to Bangsamoro was a solution in suppressing the Bangsamoro separatist movement. This study aims to determine the strategy of the Philippine government during the time of Rodrigue Duterte in realizing peace for prolonged Bangsamoro minority conflict. This paper uses the theory of conflict resolution and democracy. The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques in the form of library research. The data used is secondary data.

Keywords: *Bangsamoro, Minority, Conflict Resolution, Democracy*

Abstrak

Upaya perjanjian damai yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap konflik minoritas muslim Bangsamoro kerap menemukan jalan buntu dan ketidaksesuaian tujuan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, Pemerintahan Duterte berjanji akan mewujudkan perdamaian bagi kaum minoritas Bangsamoro. Duterte melanjutkan berbagai upaya negosiasi dan mediasi yang lebih demokratis dari upaya perdamaian yang telah dilakukan Pemerintahan sebelumnya dengan MNLF dan MILF. Kebijakan pemberian wilayah otonomi khusus bagi Bangsamoro menjadi solusi dalam meredam gerakan separatis Bangsamoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah Filipina pada masa Rodrigue Duterte dalam mewujudkan perdamaian bagi konflik minoritas Bangsamoro yang berkepanjangan ini. Tulisan ini menggunakan teori resolusi konflik dan demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research). Data-data yang digunakan merupakan data sekunder.

Kata kunci: Bangsamoro , Minoritas, Resolusi Konflik, Demokrasi

PENDAHULUAN

Minoritas muslim merupakan sebagian masyarakat kecil yang menganut agama islam dalam suatu negara. Dewasa ini minoritas muslim diberbagai negara Asia Tenggara mendapat perlakuan ketidakadilan dari pemerintahan negara mereka sendiri, contohnya pada konflik etnis Rohingya di negara Myanmar dan konflik Patani di negara Thailand. Minoritas muslim kerap mendapat perlakuan yang berbeda dari pemerintah dengan masyarakat yang berbeda keyakinan dengan mereka (Firmanzah, 2017, hal. 29-30). Oleh karena itu masyarakat minoritas harus memperjuangkan hak-hak dan menentukan nasib mereka dengan sendirinya. Tak ayal mereka mendapat perlakuan kriminalisasi dan penindasan dari pemerintah, sehingga menyebabkan munculnya berbagai gerakan pembebasan Bangsamoro diantaranya Moro National Liberation Front (MNLF), Moro Islamic Liberation Front (MILF), Abu Sayyaf Group (ASG) dan gerakan separatis lainnya.

Pada tahun 1919 pemerintah mengeluarkan ultimatum bahwa seluruh tanah-tanah di Filipina adalah milik negara. Disamping itu Pemerintah Filipina membuka lahan pertanian dan mengeluarkan peraturan tentang pertanahan secara sepihak. Setelah itu pada tahun 1944 dibangun pemukiman dan program migrasi non-muslim secara

besar-besaran di wilayah Mindanao. Dengan kebijakan pemerintah tersebut, hal ini tentunya dapat membatasi ruang gerak serta perlakuan secara tidak adil terhadap keadaan kaum muslim Mindanao. Muslim Filipina merasa bahwa mereka memiliki hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan agama, tradisi dan sumber-sumber ekonomi mereka. Meskipun masyarakat Islam mendapat tempat dalam negara Filipina, namun mereka tidak mendapatkan perhatian, keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk menepati rumah mereka tersebut (Rehayati, 2011, hal. 236).

Minoritas muslim merupakan sebagian masyarakat kecil yang menganut agama islam dalam suatu negara. Dewasa ini minoritas muslim diberbagai negara Asia Tenggara mendapat perlakuan ketidakadilan dari pemerintahan negara mereka sendiri, contohnya pada konflik etnis Rohingya di negara Myanmar dan konflik Patani di negara Thailand. Minoritas muslim kerap mendapat perlakuan yang berbeda dari pemerintah dengan masyarakat yang berbeda keyakinan dengan mereka (Firmanzah, 2017, hal. 29-30). Oleh karena itu masyarakat minoritas harus memperjuangkan hak-hak dan menentukan nasib mereka dengan sendirinya. Tak ayal mereka mendapat perlakuan kriminalisasi dan penindasan dari pemerintah, sehingga menyebabkan

munculnya berbagai gerakan pembebasan Bangsa Moro diantaranya Moro National Liberation Front (MNLF), Moro Islamic Liberation Front (MILF), Abu Sayyaf Group (ASG) dan gerakan separatis lainnya.

Perjuangan Bangsa Moro ditandai dengan lahirnya gerakan Moro Liberation Front (MLF) yang menjadi induk perjuangan Bangsa Moro dan akhirnya terpecah karena perbedaan ideologi dan keinginan. Pertama, Moro National Liberation Front (MNLF) yang dipimpin Nurulhaj Misuari dengan berideologikan nasionalis sekuler. Kedua, Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang dipimpin oleh Salamat Hashim yaitu seorang ulama pejuang, yang murni berideologikan Islam dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Filipina Selatan. Namun dalam perjalanannya, ternyata MNLF pimpinan Nur Misuari mengalami perpecahan kembali menjadi kelompok MNLF Reformis pimpinan Dimas Pundato (1981) dan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abdurrazak Janjalani (1993). Tentu saja perpecahan ini memperlemah perjuangan Bangsa Moro secara keseluruhan dan memperkuat posisi pemerintah Filipina dalam menghadapi Bangsa Moro (Helmiati, 2014, hal. 260)

Berbagai perundingan perjanjian damai telah dilakukan oleh kedua belah pihak antara Pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Mindanao. Sejak pemerintahan Ferdinan Marcos, telah disepakati perjanjian

Tripoli. Akan tetapi pemerintah sendiri tidak terlalu berkomitmen dalam menjalankan perjanjian tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Aquino dalam melaksanakan perjanjian tersebut yang memuat tentang NRMM "Nagsasariling Rehiyon ng Muslim sa Mindanaw" (Daerah Otonomi Muslim Mindanao) dengan maksimal. Kemudian terjadi pula perundingan damai yang di mediasi oleh ASEAN pada tanggal 30 Agustus 1996 di Istana merdeka Jakarta antara Ketua MNLF Nur Misuari dengan Presiden Fidel Ramos yang isinya bertujuan meredam konflik antara pemerintah dengan pihak muslim Moro. Akan tetapi perjanjian tersebut masih menunjukkan ketidakpastian nasib Bangsa Moro karena masih berlanjutnya ketegangan antara kedua belah pihak. Akhirnya pemerintah Fidel Ramos tetap melakukan tindakan represif militerisasi di wilayah basis muslim (Gafur, 2016:184).

Perjanjian perdamaian kembali dilakukan pada masa Pemerintahan Benigno Aquino III. Pada tanggal 17 Maret 2014 ketua gerakan pembebasan MILF menandatangani Perjanjian Komprehensif Bangsa Moro (CAB) yang membuka jalan atas terealisasinya Undang-undang Organik Bangsa Moro. Perjanjian ini diharapkan mengakhiri negosiasi yang berjalan selama 17 tahun dan mengakhiri konflik bersenjata yang sudah berlangsung beberapa dekade di

wilayah selatan Filipina. Namun perjanjian ini tidak berjalan lancar karena digagalkan oleh insiden Mamasapano pada Januari 2015 ketika lebih dari 40 pasukan polisi elit tewas dalam serangan (Singh, 2017). Tergelincirnya perjanjian damai dapat berdampak pada situasi keamanan di Selatan. Ini juga dapat memperkuat persepsi Muslim yang sudah lama dipegang bahwa mayoritas kristen tidak tertarik terhadap perjanjian damai melainkan lebih tertarik untuk meminggirkan minoritas muslim.

Selain itu, wilayah Mindanao telah menjadi tujuan yang sangat menarik bagi gerakan jihadis transnasional, dikarenakan wilayah tersebut memiliki faktor kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi umat islam di pulau itu. Mindanao juga memiliki perbatasan laut yang keropos dengan negara-negara mayoritas Muslim di Malaysia dan Indonesia, yang keduanya memiliki populasi besar simpatisan ISIS (Heydarian, 2017). Teror ekstrimis juga telah menjangkiti pulau Mindanao. Cabang dari salah satu gerakan yang lahir dari kedua gerakan moro telah berubah menjadi kelompok teror terkenal yang salah satu jaringan ISIS.

Galaksi kelompok-kelompok militan Muslim Mindanao ditandai oleh perpaduan yang kompleks antar isu-isu etnis agama dan berbagai tujuan politik. Secara khusus, empat kelompok militan muslim utama yaitu

Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro (BIFF), sebuah putaran awal MILF, Abu Sayaf Group (ASG), Bangsamoro Justice Movement (BJM), dan cabang Filipina atau Jemaah Islamiyah yang telah berjanji setia kepada Negara Islam dan sekarang mendukung penciptaan kekhalifahan yang benar-benar independen di Asia tenggara. Ini mewakili perubahan tujuan utama, baik dari segi politik maupun ideologis, dibandingkan dengan gagasan daerah bangsamoro yang otonom atau mandiri di Mindanao. Sedangkan MNLF telah melakukan pendekatan lebih lembut terhadap pemerintah dan mendukung proses perdamaian di bawah Duterte (Cau, 2017:82).

Beberapa perjanjian damai terhadap konflik mindanao telah dilakukan tetapi implementasi dari perjanjian-perjanjian tersebut biasanya menjadi masalah, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya proses perdamaian di kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang bersebrangan dalam memberikan saran, masukan, dan kebijakan antara kedua pihak. Duterte memiliki komitmen terhadap perundingan damai antara MILF dan Pemerintah dengan mempercepat proses BBL yang diusulkan menjadi Undang-Undang atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL). BOL yang ditandatangani oleh Presiden Rodrigue

Duterte pada tanggal 26 Juli 2018 merupakan pelaksanaan hukum perjanjian komprehensif pada Bangsamoro sebagai capaian perjanjian damai antara Pemerintah Filipina dan MILF yang telah ditandatangani pada tahun 2014. Ini merupakan harapan baru bagi Bangsamoro yang telah berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri selama lebih dari empat dekade (Stange, 2018).

Dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tentang masalah konflik Bangsamoro yaitu: “Bagaimana upaya pemerintah Filipina pada masa pemerintahan Duterte dalam menyelesaikan konflik minoritas muslim Bangsamoro?”. Negara Filipina merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, yang tentunya negara Filipina tidak menginginkan adanya pemisahan wilayah di dalam wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu pada masa pemerintahan dibawah presiden Rodrigue Duterte mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap konflik Bangsa Moro, yang diantaranya :

1. Pemerintahan Filipina dibawah Rodrigue Duterte bersikap lebih demokratis dalam mencapai perdamaian terhadap konflik minoritas Bangsamoro dengan melanjutkan cara mediasi dan negosiasi yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya.

2. Pemerintah Filipina memberikan hak otonomi daerah kepada Bangsamoro.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu waktu tertentu. Adapun pendekatan terhadap penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dan kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh (Bakry, 2017, hal. 14-15).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang yang dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah, baik untuk meneliti pertanyaan penelitian baru maupun untuk meneliti kembali pertanyaan penelitian utama (yang asli) untuk keperluan pembuktian (Bakry, 2017, hal. 200).

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori demokrasi untuk memandang ideologi negara sebagai dasar dalam upaya penyelesaian konflik. Penelitian ini juga didukung oleh konsep konflik dan resolusi konflik guna memetakan konflik ini terjadi dan proses pengelolaan konflik oleh pemerintah.

Resolusi Konflik

Dalam menggunakan teori resolusi, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana proses konflik itu terjadi. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan model konflik yang dicetuskan oleh Johan Galtung. Galtung berpendapat bahwa konflik dapat diproyeksikan sebagai segitiga dengan *Contradiction* (C), *Attitude* (A), *Behaviour* (B) di ketiga sudutnya (Miall, Ramsbotham, & Woodhouse, 2000, hal. 20-23).

Attitude/perilaku dalam konflik berarti adanya penolakan terhadap superioritas pihak lain. Asumsi yang dibangun bisa bersifat positif dan negatif, akan tetapi dalam konflik kekerasan kecenderungan yang muncul adalah menciptakan asumsi negatif terhadap pihak musuh sebagai akibat dari kemarahan dan ketidakamanan yang dirasakan. Pada konflik Bangsamoro faktor negara dengan kebijakan pembangunan besar-besaran bagi kaum

Kristen di wilayah Mindanao menjadi akar munculnya konflik kekerasan langsung. Dengan begitu hak-hak muslim untuk mendapatkan kesejahteraan dari ekonomi dan sosial budaya tereksploitasi oleh kaum kristen Filipina di Mindanao Kebijakan negara yang memindahkan penduduk Kristen utara ke daerah Filipina selatan memicu tumbuhnya gerakan separatis Bangsamoro. Oleh karena itu, terbentuknya gerakan separatis didasari oleh rasa keterancaman dan ketidakamanan dari kebijakan pemerintah tersebut. Munculnya gerakan separatis bertujuan untuk melawan pemerintah yang sewenang-sewenang dalam membuat kebijakan

Behaviour merupakan mental, ekspresi verbal atau fisik yang timbul dalam konflik. Bentuk bentuk dari behaviuor dapat meliputi tindak kekerasan, penghinaan, kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terlihat dari adanya perbedaan perlakuan yang didapat oleh masyarakat di wilayah Mindanao. Kaum Kristen mendapatkan akses yang besar dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan masyarakat Mindanao tidak mendapatkan akses yang serupa secara layak dari pemerintah. disamping itu lahirnya gerakan separatis dari Bangsamoro memicu tindakan refresif dari pemerintah. pada masa

pemerintahan Marcos diberlakukan kebijakan militerisasi yang menyebabkan korban jiwa berjatuhan (Rehayati, 2011, hal. 236). Diberlakukannya kebijakan Martial Law oleh pemerintah cenderung melahirkan berbagai penyiksaan, pembunuhan, ataupun dengan mengirim pasukan sipil untuk membantai masyarakat Mindanao.

Contradiction dalam konflik merujuk adanya ketidakcocokan tujuan yang ada atau yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai. Ini disebabkan oleh adanya ketidakcocokan antar nilai sosial dan struktur sosial. Hal ini menyebabkan tindakan kekerasan dan perilaku dari kedua belah pihak yang bertikai. Pemerintah Filipina mempunyai misi dan tujuan untuk mengasimiliasi muslim Bangsamoro ke dalam tubuh nasional dengan cara menghapuskan budaya muslim dari wilayah Mindanao. Disamping itu pemerintah mempunyai pandangan bahwa kaum muslim Moro merupakan kaum yang terbelakang dan penghambat dalam pembangunan negara. Oleh karena tindakan diskriminatif dari pemerintah, gerakan separatis bangsamoro mempunyai tujuan untuk membebaskan rakyatnya dari tekanan represif pemerintah Filipina. Mereka tidak mendapatkan keamanan dari pemerintah melainkan ancaman penggerusan budaya muslim dari pemerintah. Maka dari itu muncullah keinginan Bangsamoro untuk memisahkan diri dari Filipina (Helmiati, 2014, hal. 257).

Resolusi konflik adalah sebuah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini mengimplikasikan bahwa perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan dan struktur konfliknya telah diubah (Miall, Ramsbotham, & Woodhouse, 2000: 31). Resolusi pada dasarnya adalah upaya yang bersifat intervensi untuk mencegah aktualisasi, mendeeskalasi, menghentikan dan menyelesaikan konflik pada salah satu atau lebih dalam tahap konflik. Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan yang tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bertikai.

Sementara itu untuk mencapai penyelesaian konflik, secara teoritis terdapat banyak sekali suatu model yang dipandang paling relevan dengan topik pembahasan. Model itu adalah intervensi pihak ketiga dalam bentuk mediasi dan negosiasi.

1. **Mediasi** menggunakan cara dengan melibatkan intervensi pihak ketiga, ini adalah proses suka rela dimana pihak-pihak yang bertikai mempertahankan kendali terhadap hasilnya (mediasi murni). Maka konsiliasi sangat dibutuhkan sebagai usaha-usaha untuk menjadi penengah guna mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk bergerak menuju negosiasi..

2. **Negosiasi** merupakan proses dimana pihak-pihak yang bertikai mencari cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik mereka.

Demokrasi

Menurut Budiarjo (2008:119) Demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral. Struktur demokrasi yang dianut oleh negara Filipina telah membentuk struktur negara yang memikirkan kepentingan rakyat dan memberikan kewenangan dari rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Kalau sebuah sistem pemerintah ingin dianggap demokratis, ia harus mengkombinasikan tiga kondisi yang penting : kompetisi yang berarti antara individu dan kelompok terorganisir untuk kekuasaan politik, partisipasi yaitu saling terbuka dalam pemilihan dan kebijakan, dan dingkatan tertentu kebebasan sipil dan politik yang cukup untuk memastikan integritas kompetisi politik dan partisipasi. seharusnya demokrasi hadir dan bertindak sebagai sistem pengelolaan konflik tanpa kembali terjebak pada kekerasan.

Upaya pemerintah dalam demokratisasi wilayah konflik minoritas dengan strategi otonomi. Otonomi dipandang

dapat membantu pengelolaan terhadap konflik internal, atau menjadi dasar kehidupan bersama dalam kedamaian antara komunitas yang berbeda. Terdapat beberapa dari keunggulan otonomi yaitu (International IDEA, 2000): a). Menjamin minoritas untuk memiliki sedikit kekuasaan atas negara. b). Menawarkan prospek lebih baik bagi minoritas untuk memelihara kebudayaannya. c). Memungkinkan menunda atau menghentikan keinginan untuk memisahkan diri. d) Dapat meningkatkan integrasi politik dan kelompok etnik. e). Memberikan kontribusi pada konstitusionalisme.

PEMBAHASAN

Mindanao merupakan kawasan Filipina yang menjadi basis umat Islam dengan kondisi yang memprihatinkan. Filipina Selatan identik dengan kawasan berbahaya, basis kekerasan, konflik, miskin dan tidak terurus. Inti permasalahan di Filipina Selatan tidak lain seputar isu ketidakadilan ekonomi, politik dan perlakuan buruk Pemerintah Filipina atas “Bangsamoro” yang Muslim di Mindanao (Maksum, 2018, hal. 127). Kelompok muslim minoritas di Filipina harus hidup dalam tekanan dan berjuang menentukan nasib mereka sendiri. Kaum Minoritas secara khusus sering dikecualikan atau terpinggirkan di rumah mereka sendiri, masyarakat minoritas biasanya dianggap

sebagai kaum terlemah dalam kemajuan sosial-ekonomi bangsa.

Pada konteks konflik Bangsamoro, salah satu faktor utama yang mempengaruhi potensi pengembangan pemerintahan yang efektif dan demokratis di wilayah Bangsamoro adalah hasil akhir dari proses perdamaian. Saat ini proses yang berkaitan adalah dengan menyiapkan unsur-unsur struktural utama dari hubungan baru antara Bangsa Moro dan pemerintah nasional, dengan proses yang berkaitan dengan demokrasi dan good governance diturunkan kepada kerja Komisi Transisi penyusunan Undang-Undang Dasar, dan MILF yang dipimpin oleh Otoritas Transisi Bangsamoro. Secara historis, perhatian memadai untuk pemerintahan dan demokrasi isu pasca-konflik selama proses perdamaian memiliki banyak kasus sehingga mengakibatkan pemerintahan yang kurang demokratis dan menyebabkan peningkatan ketidakstabilan dari waktu ke waktu (Meisburger, 2014).

Pada tanggal 10-11 Juli 2017 OKI menjadi mediator dalam terbentuknya perjanjian damai antara pemerintah dan perwakilan Bangsamoro yang diadakan di Abidjan, Pantai Gading. Untuk mendukung proses perdamaian antar kedua belah pihak, Sekertaris Jendral OKI menyelenggarakan Sidang ke-4 Forum Koordinasi Bangsamoro (BCF) pada tanggal 11 Juli 2017. Dewan Menteri Luar Negeri OKI meminta dalam pertemuan BCF ini dapat membahas cara dan

sarana dalam menemukan kesamaan antara Tripoli Agreement 1976, Final Peace Agreement tahun 1996 dan Comprehensive Agreement on the Bangsamoro untuk menyelaraskan dua jalur perdamaian dan mempertahankan keuntungan yang terkandung dalam perjanjian ini. Disamping itu MNLF dan MILF telah mengenal dan menghormatinya perjanjian-perjanjian tersebut. Sidang di Abidjan ini melahirkan beberapa gagasan yaitu (Sandria, 2018) :

Upaya Demokratisasi Pemerintahan Filipina Terhadap Konflik Bangsamoro

Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi juga dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Pemerintahan atau sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Perilaku demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang senantiasa bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur demokrasi. Pemerintahan demokratis membutuhkan kultur untuk membuatnya performed (eksis dan tegak). Perilaku demokrasi ada dalam manusia itu sendiri, baik selaku warga negara maupun pejabat negara (Kristeva, 2015, hal. 79).

Otonomi juga memungkinkan penyelesaian masalah etnik tanpa memperkuat rasa kesukuan. Otonomi mendefinisikan wilayah sebagai wilayah

geografis dan bukan etnik. Namun beberapa bentuk otonomi mungkin bertindak sebaliknya. Sebuah kualifikasi penting mengenai otonomi adalah bahwa ia hanya bisa bekerja bila minoritas terkonsentrasi secara geografis dan merupakan mayoritas wilayah tersebut. Strategi otonomi merupakan pilihan suatu negara untuk mempertahankan integritas dan ideologi negara yaitu demokrasi. Ini juga merupakan bentuk tindakan menjaga keamanan wilayah kekuasaan negara dari gerakan separatis yang ingin memisahkan dan memerdekakan diri (Khaerina, 2017).

Desentralisasi dipandang sebagai strategi penting dalam rangka memperkuat demokratisasi. desentralisasi dipercaya mampu membawa unit pembuat kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat dengan tujuan untuk membuka peluang partisipasi warga yang lebih luas dalam proses-proses politik, dan sekaligus memasukkan preferensi masyarakat yang lebih luas ke dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian peningkatan partisipasi masyarakat pada level lokal dapat memperbaiki kinerja demokratik dari institusi politik dan karenanya memiliki dampak positif terhadap konsolidasi demokrasi negara secara keseluruhan (Rahmatunnisa, 2011).

Pemerintah Filipina melakukan upaya pembicaraan damai terhadap pihak MILF dengan memperhatikan akibat terhadap

situasi dan kondisi yang ada di publik. Kebijakan publik ini sangat berpengaruh terhadap posisi suatu negara dalam menghadapi permasalahan. Dalam hal negosiasi perdamaian, pemerintah Filipina berusaha bersikap netral dengan tidak memihak kepada rakyat Islam atau rakyat Kristen yang ada di Mindanao, sehingga dapat menyelesaikan konflik secara damai dan menjaga agar tidak tumbuh konflik yang baru di daerah Mindanao. Rangkaian proses penyelesaian konflik juga harus diatur dan disusun secara hati-hati sehingga tidak jarang apabila dalam penyelesaian konflik membutuhkan waktu yang cukup lama (Rafiq, 2017, hal. 69). Dalam melakukan negosiasi pemerintah menunggu waktu dan kondisi yang matang agar tercapai kesepakatan damai antara keduanya.

Di negara Filipina pada Undang-undang pasal X, bagian 3 dari Kontstitusi 1987 menuntut agar kode pemerintah daerah dapat diberikan oleh Kongres pada tahun-tahun berikutnya untuk melayani dan sebagai dasar yang kokoh untuk desentralisasi. Konstitusi menjabarkan bahwa hukum desentralisasi dengan mekanisme yang efektif, inisiatif, referendum, mengalokasikan unit-unit pemerintah daerah yang berbeda kekuasaan, tanggung jawab, sumber daya, menyediakan kualifikasi, pemilu, pengangkatan dan pemberhentian, istilah, gaji kekuatan dan fungsi serta tugas pejabat

setempat. Pelaksanaan ini menuntut proses desentralisasi yang dimulai dengan Kode Pemerintah Daerah tahun 1991, yang rinciannya dinegosiasikan di Kongres Filipina (Ziegenhain, 2016). dengan begitu pemerintah Filipina sudah mempunyai acuan untuk menerapkan sistem desentralisasi pada bagian wilayah negaranya.

Pemerintah dan MILF telah bersepakat bahwa untuk meningkatkan perdamaian itu harus berlabuh pada subsidiaritas. Istilah ini berarti bahwa penduduk setempat lebih tahu konteks dan sifat masalah mereka. Dengan demikian mereka berada dalam kondisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi pendekatan yang paling layak untuk memecahkan masalah mereka (Calballero & Torres, 2016, hal. 31). Proses perdamaian pemerintah dengan kelompok MILF bertujuan untuk menyelesaikan empat dekade konflik bersenjata panjang, antara penduduk Muslim Mindanao dan Militer. Ini dimulai pada tahun 1996, dan mencapai tonggak sejarah dengan tanda tangan pada 2014 pada Perjanjian Komprehensif Bangsamoro (CAB). Perjanjian mengharapkan penciptaan wilayah oleh Kongres Filipina, dari yang benar-benar otonom, demokratis, dan Islam 'Bangsamoro' (Tanah Moro). Hal ini dilengkapi dengan beberapa lampiran, yang mengatur program pembangunan sosial-ekonomi dan proses keadilan transisional.

Bangsamoro Basic Law (BBL)

Perjanjian damai melalui otonomi khusus sebenarnya telah disepakati pada masa pemeritahan Presiden Benigno Aquino dalam upaya mengakhiri pemberontakan dari gerakan separatis Bangsamoro. Aquino telah mengirimkan kepada parlemen usulan undang-undang yang memberi otonomi kepada minoritas Muslim. Pemerintah Filipina juga telah melakukan beberapa kebijakan dengan melanjutkan desentralisasi dan kebijakan ekonomi yang mendorong investasi di selatan dan daerah terpencil lainnya. Kebijakan ekonomi ini yakni dengan membuat zona ekonomi khusus baru yang dirancang untuk menarik investasi dan menjadi salah satu strategi penyelesaian konflik insurjensi di Filipina Selatan Di Filipina, Desentralisasi atau regionalisasi sudah diterima sebagai fakta oleh para pembuat keputusan. Sebagai contoh, tidak ada tingkat upah minimum nasional yang ditetapkan pada tingkat yang berbeda secara regional. Hal ini adalah penerimaan pertimbangan ekonomi yang berbeda antara masing-masing daerah (Shindyawati, 2019, hal. 39).

Di bawah kepemimpinan Aquino, Perjanjian Komprehensif pada Bangsamoro (CAB) tampaknya memberikan momen penting dalam perjuangan panjang.. Hal itu dimaksudkan untuk menetapkan dasar hukum otonomi Moro, termasuk pengaturan administrasi, rincian pembagian kekuasaan, dan bagaimana pendapatan akan terbentuk

dan meningkat di wilayah Bangsamoro (Acton, 2016). *Bangsamoro Basic Law* (BBL) merupakan aspirasi umat Islam untuk menentukan identitas dan nasib mereka sendiri. Undang-undang ini akan menciptakan tanah air Bangsamoro baru yang terdiri dari provinsi, kota, dan wilayah yang berdekatan serta memilih untuk menjadi bagian dari entitas Bangsamoro. BBL menjabarkan kerangka kerja untuk pemerintahannya, dengan ketentuan yang mempertimbangkan budaya dan tradisi Muslim serta menangani dasar konstituennya. Kepentingan serta kebutuhan bagi orang-orang Bangsamoro dapat terwujud dengan perjanjian yang telah ditandatangani, khususnya Perjanjian Komprehensif Bangsamoro (CAB). BBL yang diusulkan oleh Bangsamoro tetap mempertimbangkan negosiasi damai dan perjanjian-perjanjian lain yang diperoleh selama beberapa dekade, yaitu Perjanjian Tripoli dan Final Peace Agreement (Lagdameo-Santilan, 2018).

Tragedi Mamasapano yang terjadi disaat pemerintahan Aquino III telah menunda disahkannya Undang-Undang Dasar Bangsamoro (BBL) untuk membuat otonomi politik baru bagi umat Islam. Namun, masih ada harapan untuk menghidupkan kembali itu. Upaya sekarang yang sedang dilakukan untuk melanjutkan proses perdamaian dan menunggu persetujuan dari Kongres Filipina di bawah

pemerintahan baru. Presiden Rodrigo Duterte baru-baru ini menciptakan sebuah mekanisme transisi yang akhirnya akan menempatkan otonomi Moro. Mekanisme ini berada di bawah bimbingan dari Office of the Presidential Adviser on the Peace (OPAPP) yaitu posisi kabinet yang merupakan bagian dari Departemen Eksekutif (Magdalena, 2018)

Bangsamoro Organic Law (BOL)

Pada masa pemerintahan Filipina saat ini, Duterte berusaha untuk menghidupkan kembali perjanjian damai yang dikenal sebagai hukum dasar Bangsamoro yang ditujukan untuk mengakhiri dekade pemberontakan di Mindanao Filipina Selatan. Sebanyak 30 RUU yang gagal disahkan oleh pendahulu Duterte telah direvisi. Disamping itu Mindanao merupakan wilayah yang memiliki deposit mineral dan memegang setengah dari cadangan negara itu akan dikelola oleh pemerintah dan wilayah otonom Muslim. Ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menjaga sumber daya negara. Duterte juga menggunakan perjanjian damai dan perluasan wilayah otonom Mindanao digunakan sebagai pengungkit bagi kelompok pemberontak lainnya untuk menghentikan kekerasan dengan meletakkan senjata mereka (Blomberg News, 2017)

Pada tanggal 26 Juli 2018, Presiden Filipina Rodrigue Duterte mengesahkan

Undang-undang Organik Bangsamoro (BOL) sebagai revisi dan pengganti dari Undang-Undang Dasar Bangsamoro (BBL). Undang-Undang ini memberi entitas baru yaitu Kawasan Otonomi Muslim Bangsamoro di Mindanao (BARMM), kekuatan politik dan pertumbuhan ekonomi yang telah dijanjikan pemerintah-pemerintah terdahulu kepada kelompok separatis agar menghentikan konflik. Upaya yang telah dilakukan Duterte ini merupakan usaha dalam mengatasi ekstremisme dan menghilangkan pemberontakan yang berlangsung setengah abad. Undang-Undang ini akan membantu membawa kelompok separatis yang memisahkan diri dapat kembali menempuh jalan politik dan menghapus kemungkinan terjadinya kembali insiden seperti Marawi (Republika.co.id, 2018).

Namun ada asumsi lain yang menyatakan bahwa pengesahan BOL tidak menjamin dalam penghapusan ekstremisme. Perlu diingat bahwa kelompok-kelompok jaringan teroris seperti Abu sayyaf dan Dawlah Islamiyah terkenal kelompok-kelompok arus utama seperti MILF terlihat tidak efektif dalam perjuangan penentuan nasib sendiri. Oleh karena itu untuk mencegah terulangnya sejarah, pembentukan Daerah Otonomi Bangsamoro harus benar-benar menjadi pemerintahan sendiri dan otonom. Mungkin tidak mudah menghilangkan ekstremisme dalam semalam, akan tetapi langkah untuk memberikan

otonomi yang luas pada kawasan itu merupakan langkah yang benar dan berpotensi /mengurangi konflik kekerasan (The ASEAN Post, 2018).

KESIMPULAN

Presiden Rodrigue Duterte telah melakukan strategi negosiasi tidak hanya kepada salah satu kelompok melainkan kepada kedua gerakan Bangsampro terbesar yaitu MNLF dan MILF. Strategi ini merupakan hasil dari perundingan perjanjian perdamaian yang dimediasi oleh OKI di Pantai Gading. Kedua gerakan utama Bangsamoro MNLF dan MILF menyetujui janji Presiden Rodrigue dalam meluluskan *Bangsamoro Basic Law* (BBL) yang sekarang menjadi *Bangsamoro Organic Law* (BOL) di Kongres. Presiden Filipina Rodrigue Duterte telah melakukan referendum penandatanganan *Bangsamoro Organic Law* yang magandung Hukum Dasar Bangsamoro diantaranya: pengakuan identitas, perluasan wilayah otonomi, pemerintahan dan untuk keperluan lainnya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kelemahan dikarenakan adanya keterbatasan pada penulis. Kelemahan tersebut diantaranya:

1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian masih terbatas dikarenakan hanya menggunakan data dari karya ilmiah di internet serta

- keterbatasan waktu yang menyarankan dalam penelitian selanjutnya dimiliki. yang berhubungan dengan konflik minoritas
2. Penelitian ini belum muslim Bangsamoro dan upaya pemerintah membahas secara rinci tentang Filipina terhadap konflik minoritas dapat pemilihan umum Bangsamoro melakukan penelitian dengan teori dan fokus Organic Law (BOL) yang yang berbeda, sehingga dapat diadakan pada tanggal 21 membandingkan atau melihat kesinambungan Januari 2019 dikarenakan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu pembatasan penelitian hanya penelitian pada keadaan ekonomi, politik, pendidikan dan lapangan kerja pada pada tahun 2016 sampai 2018. Bangsamoro perlu dilakukan dalam Kemudian penelitian ini juga mengawal upaya pemerintah Filipina belum menggambarkan terhadap resolusi konflik Bangsamoro. bagaimana keadaan Selanjutnya penelitian pada pemilihan umum pembangunan ekonomi, politik, pendidikan, lapangan terhadap BOL dan masa Transisi pekerjaan pada kaum pemerintahan ARMM menuju BARMM Bangsamoro di wilayah yang diusulkan pada tahun 2022 perlu Mindanao untuk mendukung dilakukan dalam mendukung terciptanya terciptanya kesejahteraan dan perdamaian di Filipina Selatan. Peneiliti juga kemajuan sebuah negara. menyarankan agar penelitian selanjutnya

Dikarenakan adanya keterbatasan dapat melakukan interview atau observasi dalam melakukan penelitian ini sehingga sehingga data yang didapat dapat lebih hasil yang didapatkan belum mewakili teori menggambarkan keadaan sebenarnya pada secara keseluruhan. Oleh karena itu penulis konflik Bangsamoro di Filipina Selatan.

REFERENCES

Books

Kristol, Irving. 1983. *Reflection of a Neoconcerivative: Looking Back, Looking Ahead*. New York: Free Press.

Bakry, U. S. (2017). *Metode Peneltian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiarjo, M. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: CV Prima Grafika

Helmiati. (2014). *Sejarah Islam Asia tenggara*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Kristeva, N. S. (2015). *Manifesto Wacana Kiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maksum, A. (2018). *Potret Demokrasi di Asia Tenggara Pasca Perang Dingin: analisa, dinamika, dan harapan*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta.

Miall, H., Ramsbotham, O., & Woodhouse, T. (2000). *Contemporary conflict Resolution: the prevention, mangement and transformation of deadly conflicts*. (1 ed.). (T. B. Susanto, Penerj.) Jakarta: PT Raja Grafindo Sastrio.

Book Sections:

Ziegenhain, P. (2016). Political Enggineering, Decentralization and Federalism in Southeast Asia: Strengths and Weaknessesof Governace. In w. Hofmeister, & E. Tayao, *Federalism and Decentralization Perception for Political and Institutional Reforms* (pp. 51-66). Makaty City, Philippines: Local Government Development Foundation.

Journal Articles

Calballero, J. A., & Torres, M. A. (2016). The Bangsamoro Peace Prosses and Peacebuilding in Mindanao: Implication studies and National Depelovemetnet. *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences*, 19, 20-38.

Cau, E. (2017). Duterte, the Bangsamoro Autonomous Region Conundrum and its implication. *Asia Japan Journal no.12*, 79-97.

Firmanzah. (2017). Dinamika Gerakan Pembebasan Muslim Moro di Filipina Selatan: Studi Terhadap Moro National Liberation Front (1971-19996). *Raden Fatah*, 29-30.

Ghofur, A. (2016). Dinamika Muslim Moro Di Filipina Selatan Dan Gerakan Separatis Abu Sayyaf. *Sosial Budaya*, 175-188.

Heydarian, R. J. (2017, August 6). Crisis in Mindanao:. *Al jazeraa*. Retrieved 02 16, 2019, from <http://studies.aljazeera.net>

Khaerina, H. (2017, Juni). Perbandingan Kebijakan Desntralisasi Asimetris Antara Filipina Selatan dan Indonesia. *Prodi Peperangan Asimetris*, 03, 39-63.

Lagdameo-Santilan, K. (2018, 16 02). *The Bangsamoro Basic Law: What it means for peace in Mindanao*. Retrieved from Pressenza International Pres Agency: <https://www.pressenza.com/2018/02/bangsamoro-basic-law-means-peace-mindanao/>

Magdalena, F. V. (2018). Managing the Muslim Minority in the Philippines. *Dirasat*.

Rafiq, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Filipina dalam Menangani Gerakan Islamic Liberation Front. *International Relations*, 66-73.

Rahmatunnisa, M. (2011, Mei). Desentralisasi dan Demokrasi. *Governance*, 1.

Rehayati, R. (2011). Minoritas Muslim. *Ushuluddin*, 225-242.

Shindyawati. (2019, Januari). Desentralisasi dalam Integrasi Nasional studi kasus: Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia dan Gerakan Pemberontak Moro di Filipina. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 1, 32-40.

Singh, B. (2017). Duterte : Delivering the Promise Peace to Mindanao. *RSIS Commentary*, 112.

Stange, G. (2018). From frustration to escalation in Marawi: an interview on conflict Transformation in Southeast Asia With the Indonesian Peace and Conflict Advisor Shadia Marhaban. *Austrian Journal of South East Asian Studies*, 11(2), 235-241.

Article in Newspaper

Blomberg News. (2017). *Duterte seeks reboot of BBL amid attacks in Mindanao*. Business Mirror. Retrieved Juni 30, 2019, from <https://bussinessmirror.com.ph/2017/07/17/duterte-seeks-reboot-of-bbl-amid-attacks-in-mindanao/>

Republika.co.id. (2018, Juli 27). *Duterte Akhirnya Sahkan UU Otonomi Bangsamoro*. (A. Nursalikhah, Ed.) Retrieved Juli 4, 2019, from Republika.co.id: <https://m.republika.co.id/berita/pchnxa366/duterte-akhirnya-sahkan-uu-otonomi-bangsamoro>

The ASEAN Post. (2018, December 7). *Will Bangsamoro Organic Law bring peace*. Retrieved Juli 4, 2019, from theaseanpost.com: <https://theaseanpost.com/article/will-bangsamoro-organic-law-bring-peace>

The Diplomat. (2018). *Bringing Peace to the Phipilippines' Troubled South: The Bangsamoro Organic Law*. The Diplomat.

Translated Books:

International IDEA. (2000). *Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options for Negotiators* (1 ed.). (P. Harris, B. Reilly, Penyunt., & P. d. (LP4M), Penerj.) Depok, Indonesia: AMEEMPRO.

Theses, Disertations, Research Reports:

Sandria, A. F. (2018). Upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Moro Filipina Selatan 2015-2017 . *Naskah Publikasi*.

Seminar Papers:

Acton, C. S. (2016, Mei). Will the 'Comprehensive Agreement on the Bangsamoro' provide a peaceful and lasting solution to the insurgency and security challenges in the Southern Philippines? *Indo-Pacific Strategic Papers*.

Internet (Online Journals)

Meisburger, T. (2014). Developing Political Parties in the Bangsamoro: An Assessment of Needs and Opportunities. *The Asian Foundation*. Retrieved Juni 30, 2019, from <http://asiafoundation.org/resources/pdfs/DevelopingPoliticalPartiesintheBangsamoroAnAssesmentofNeedsandOpportunities.pdf>